

MODEL KOLABORASI PIHAK PEMERINTAH DAN PIHAK SWASTA DALAM PEMBINAAN ATLET BULUTANGKIS DI JAWATIMUR

Rahmawati ¹⁾, Sedarmayanti ²⁾

^{1) 2)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: Rahmavenusz14@gmail.com

ABSTRAK

Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan; pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi; pembinaan dan pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia sarana dan prasarana olahraga. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pembinaan Olahraga.

Penelitian ini bertujuan mengetahui: Bagaimana model kolaborasi pihak pemerintah dan pihak swasta dalam pembinaan atlet bulutangkis di jawa timur dan apa saja hambatan-hambatan dalam model kolaborasi pihak pemerintah dan pihak swasta dalam pembinaan atlet bulutangkis di jawa timur dan juga apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan atlet bulutangkis di jawa timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dispora dan untuk mengetahui hambatan dan pendukung pembinaan atlet bulutangkis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Dari hasil wawancara dan observasi terhadap masing-masing indicator maka dapat dinyatakan bahwa Kerjasama atau kolaborasi pihak pemerintah dan pihak swasta dalam pembinaan atlet bulutangkis di jawa timur sudah melakukan Kerjasama dengan baik dalam pembinaan atlet bulutangkis dan meskipun memiliki hambatan dalam kerjasamanya. Saran dari penulis untuk memperbaiki hambatan tersebut untuk kemajuan atlet bulutangkis di jawa timur agar bisa meningkatkan prestasi yang lebih baik.

Kata Kunci: Model Kolaborasi Pihak Pemerintah Dan Pihak Swasta, Pembinaan Atlet Bulutangkis

ABSTRACT

The Department of Youth, Sports and Tourism has the task of carrying out regional government affairs based on the principle of autonomy and assistance in the field of Youth, Sports, Tourism and the Creative Economy. coaching and development of educational sports; fostering and developing performance sports and recreational sports; institutional guidance and development, human resources, sports facilities and infrastructure. evaluation and preparation of work implementation reports in the Sports Development Sector.

This study aims to find out: How is the collaborative model of the government and private parties in coaching badminton athletes in East Java and what are the obstacles in the collaboration model of the government and private parties in coaching badminton athletes in East Java and also what are the supporting and inhibiting factors in coaching athletes badminton in East Java. The purpose of this study was to determine the role of youth sports and to find out the obstacles and supports for coaching badminton athletes. This study uses a qualitative method.

From the results of interviews and observations of each indicator, it can be stated that the collaboration or collaboration of the government and the private sector in coaching badminton athletes in East Java has collaborated well in coaching badminton athletes and even though it has obstacles in cooperation. Suggestions from the author to fix these obstacles for the progress of badminton athletes in East Java in order to improve better performance.

Keywords: Model Of Collaboration Between the Government and The Private Sector, Coaching Badminton Athletes

A. LATAR BELAKANG

Di masa sekarang dan masa pandemi saat ini, olahraga wajib dilakukan oleh semua orang tua, remaja dan anak-anak untuk memperkuat daya tahan tubuh dan daya tahan tubuh setiap individu. Olahraga juga menjadi alternatif pengobatan rasa bosan dan obat alami untuk mencegah serangan jantung. Pada dasarnya olahraga dapat dilihat sebagai aktivitas fisik yang memenuhi kebutuhan tubuh kita dan olahraga pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Olahraga yang populer di masyarakat antara lain sepak bola, futsal, bola voli, basket, dan bulu tangkis.

Pentingnya olahraga bagi kehidupan manusia bukan lagi menjadi rahasia umum, olahraga menjadi suatu kegiatan rutinitas yang mampu membuat tubuh seseorang menjadi sehat dan bugar. Olahraga bisa berupa aspek yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan. Selain itu Olahraga juga merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan bagi setiap kehidupan manusia dan juga merupakan suatu bentuk aktivitas yang terencana dan terstruktur yang dimiliki oleh setiap individu manusia. **Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional** yang menyatakan bahwa keolahragaan nasional bertujuan memelihara serta meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, mutu manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Dalam perkembangan dunia olahraga, pelatihan merupakan faktor yang sangat penting karena berkembang atau tidaknya dunia olahraga tergantung dari pelatihan itu sendiri. Latihan adalah hasil usaha maksimal atlet atau kelompok atlet (tim) untuk mencapai tujuan bersama. Menurut peneliti, bulu tangkis merupakan olahraga yang paling mahal karena semua peralatan seperti raket, sepatu, senar, bulu tangkis membutuhkan biaya yang tidak sedikit, bahkan Pemprov Jatim, seperti Dispora atau Pbsi, jarang memiliki fasilitas yang cukup untuk menjadi juara atlet. Pemerintah Dispora dan PBS pun jarang memberikan insentif kepada atlet bulutangkis, istilahnya uang membosankan bagi atlet. Bahkan, peneliti kecewa dengan pemerintah olahraga yang kurang memperhatikan olahragawan Jawa Timur.

Kendala setiap daerah yaitu kurangnya perhatian Pbsi terhadap atlet-atlet yang pernah berprestasi, dan kendala juga terhadap atlet yang kurang di fasilitasi oleh pemerintah provinsi atau pemerintah daerah terutama pada organisasi persatuan bulutangkis seluruh Indonesia kabupaten atau kota yang kurang rasa perhatiannya terhadap atlet yang berprestasi akan fasilitas seperti raket, senar, shuttlecock (atau bola bulutangkis) dan sepatu. Olahraga bulutangkis ini adalah olahraga mahal di bandingkan dengan cabang olahraga yang lain dan disitulah Pbsi kurang memfasilitasi peralatan bulutangkis.

Sasaran pembinaan atlet tertuju pada beberapa aspek penting, seperti Sikap mental terhadap pelaksanaan pelatihan meliputi, kesediaan untuk melaksanakan kerja keras sebagai syarat mutlak untuk sukses, kesiapan menerima kepemimpinan pelatih, dan kesiapan untuk menjalin kerja sama dalam sebuah tim, dan aspek yang paling penting dalam pembinaan atlet yaitu harus tersedianya sarana dan prasarana. Menurut **Undang-Undang RI NO 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional** Bab VII pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Ayat 2 menyatakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi pengolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, sarana dan prasarana, serta penghargaan dan keolahragaan.

Pemerintah daerah mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan pembinaan olahraga. Tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 Bab V tentang system keolahragaan nasional pada pasal 13, ayat 1 dan 2 tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi pengawasan penyelenggaraan keolahragaan nasional. Ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Upaya pemerintah ini sangat penting dalam memajukan kegiatan dibidang olahraga, selain merupakan sarana peningkatan prestasi baik

untuk lokal, regional, nasional maupun internasional.

Pengembangan olahraga sampai sekarang ini mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan penerapan teknologi pembinaan olahraga khususnya cabang olahraga yang sangat populer yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam pembibitan atlet, dan alat-alat infrastruktur yang diterapkan pada pola pembangunan daerah dimana partisipasi masyarakat kemudian menjadi kunci keberhasilan peningkatan kualitas pemerintah daerah melalui strategi pembinaan masyarakat yang tepat dapat dilihat dari Kewenangan Pemerintah tersebut. Dalam pemberdayaan masyarakat di bidang olahraga, ditangani oleh Dinas Pemuda dan Olahraga yang kemudian mempunyai fungsi membina dan menyiapkan sumber daya pendukung bagi tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat tersebut melalui tahap-tahap pembinaan melalui metode pelatihan dan mendayagunakan organisasi-organisasi masyarakat sebagai pendukung keberhasilan program tersebut dengan revitalisasi peran masyarakat sebagai faktor utama keberhasilan peningkatan olahraga melalui dari keluarga,sekolah sampai kelembaga keolahragaan.

Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan akan setiap kegiatan olahraga. Hal ini dilakukan sebagai bentuk memasyarakatkan olahraga kepada semua kalangan. Selain itu bertujuan untuk membantu mensejahterakan pecinta olahraga dan juga masyarakat. Kemudian, juga berguna menciptakan sumber daya yang berkualitas, sehat jasmani dan rohani sebagaimana yang telah tertuang dalam “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional” yang menyatakan bahwa “Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia disiplin, sportivitas, memperkukuh ketahanan nasional, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa”

Selanjutnya, tujuan dari Olahraga itu sendiri sangat beragam. hingga mengeluarkan berbagai pengertian olahraga yang sangat luas serta banyak yang menganggap bahwa olahraga hanya sebagai hobi, mempercepat proses diet, atau keinginan membentuk otot tubuh. Namun ada juga yang hanya menjadikannya sebagai kegiatan bermain.

Bulutangkis sebagai salah satu cabang olahraga permainan yang populer dan digemari oleh masyarakat Indonesia, mulai dari anak-anak sampai tingkat orang tua, laki-laki maupun perempuan. Bulutangkis cepat menyebar di pelosok daerah-daerah dikarenakan dengan olahraga bulutangkis ini Negara Indonesia dapat dikenal di dunia Internasional yaitu dengan prestasi-prestasi yang dicapai oleh atlet-atlet Indonesia. Dengan memasyarakatnya bulutangkis tersebut maka usaha-usaha untuk menuju prestasi bulutangkis harus secara terus menerus digalakkan dan ditingkatkan guna mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang telah diperoleh, agar membawa nama harum Negara Indonesia ditingkat dunia.

Tentu saja, prestasi tinggi para atlet Indonesia ini dapat dicapai melalui kerja keras dan latihan yang baik, dan mereka secara teratur diprogram dalam hal teknik, taktik, mentalitas, dan kebugaran fisik. Sejatinya, puncak prestasi olahraga saat ini tidak hanya bergantung pada bakat alam, seolah-olah master olahragalah yang dilahirkan. Anggapan seperti itu harus ditolak, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan olahraga modern. Perkembangan olahraga kompetitif tidak hanya bergantung pada bakat, tetapi juga pada proses atau pelatihan itu sendiri. Pepatah bahwa juara tidak dilahirkan, tetapi dibentuk dan diciptakan, bahkan bakat menjadi faktor dominan.

Usaha-usaha untuk dapat meningkatkan prestasi bulutangkis sudah banyak ditempuh oleh pihak pemerintah maupun swasta, pelatih ataupun pembina. Penelitian dibidang keolahragaan merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan prestasi olahraga. Penelitian dibidang keolahragaan sangat besar kegunaannya terhadap mutu prestasi meskipun perannya tidak secara langsung. Demikian juga penelitian pada cabang olahraga bulutangkis sangat diperlukan untuk memberi masukan bagi sistem pembinaan yang telah dilakukan pada masa kini. Hal ini besar manfaatnya untuk lebih memantapkan sistem pembinaan bulutangkis di perkumpulan- perkumpulan bulutangkis dan sekolah-sekolah (U Firmansyah, 2013).

Permainan bulutangkis sebagai olahraga prestasi mendapat perhatian yang relatif besar dari masyarakat yang ditunjukkan dengan adanya dukungan dan pembinaan melalui berbagai wadah yang salah satunya adalah sekolah atau Diklat yang dilakukan oleh

Pengurus Cabang Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) di setiap kabupaten dan kota. Wadah ini merupakan wujud kepedulian masyarakat terhadap perkembangan bulutangkis dan upaya pencapaian terhadap prestasi yang setinggi-tingginya. Sekolah atau Diklat bulutangkis sebagai wadah pembinaan olahraga bulutangkis usia dini mulai banyak bermunculan di daerah-daerah.

Dinas pemuda dan olahraga (DISPORA) adalah salah satu instansi pemerintahan yang bergerak dalam bidang kepemudaan dan olahraga. Dinas ini bertugas dalam menyusun dan menyiapkan rencana strategis sekretariat dinas dan bidang-bidang dalam lingkup dinas, mengkoordinasikan dengan instansi terkait, mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan teknis di bidang pemuda dan olahraga dan tugas lain yang diserahkan oleh Walikota. serta melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkup pemuda dan olahraga dengan laporan secara berkala.

Pada tahun 2019, PB Djarum terlibat kontroversi dengan pemerintah dan memutuskan untuk menutup program pelatihan yang telah dijelankannya. Isu tersebut menarik perhatian publik dimana masyarakat justru lebih berpihak pada PB Djarum karena PB Djarum memiliki pengaruh yang besar terhadap prestasi olahraga Indonesia. Kontroversi Persatuan Bulutangkis Djarum (PB) terkait pembatalan uji coba bulu tangkis menuai reaksi beragam dari masyarakat. Namun di balik audisi PB Djarum, tantangan sesungguhnya terletak pada pengembangan model pembinaan bibit-bibit atlet nasional. PB Djarum berencana menghentikan program beasiswa bulutangkis pada 2020 setelah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menuding lembaganya melakukan kekerasan terhadap anak. Tuduhan ini bermula pada akhir Juli 2019 ketika KPAI menyatakan ujian beasiswa yang diselenggarakan PB Djarum merupakan pencabulan anak secara tersembunyi. Oleh karena itu, DBON sendiri sudah dilaksanakan melalui Program Perencanaan Besar Olahraga Nasional (DBON) sejak tahun lalu dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 dan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2021. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama semua pihak, bukan hanya tanggung jawab. Sebab, pembinaan olahraga di setiap daerah harus dimulai sejak usia muda dan menjadi tanggung jawab pemerintah

daerah atau provinsi. Pemerintah daerah dan pusat harus bersinergi agar DBON berjalan.

Tabel 1. Kegiatan Olahraga yang pernah dilakukan

No	Kegiatan	Bulan	Lokasi
1.	Pengiriman Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Tahun 2021	Agustus-September	Sumatera Selatan
2.	TC Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Tahun 2021	Juli-Agustus	Jawa Timur
3.	Optimalisasi Sentra-Sentra Pembinaan Olahraga (PPLPD) Tahun 2021	Feb-September	Kota Kediri, Kab. Ngawi, Kab. Sidoarjo, Dan Kota Surabaya

Sumber: Data Peneliti

B. LANDASAN TEORITIS

1. Collaborative Governance

Sebelum mempelajari tata kelola kolaboratif, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang tata kelola. Definisi tata kelola perlu diperjelas karena istilah tata kelola menjadi dasar konsep tata kelola kolaboratif. Hal ini untuk menemukan makna yang lebih konkrit dan menghindari kebingungan bagi peneliti dan pembaca. Dari perspektif penelitian pemerintahan sering muncul istilah pemerintahan dan manajemen, kedua istilah ini hampir mirip namun sebenarnya memiliki arti yang berbeda.

Selain itu, pada kajian governance juga memiliki pemaknaan yang berbeda dikalangan beberapa ahli. Sebagai contoh terdapat istilah good corporate governance, good governance, network governance, bad governance dan lain sebagainya Perbedaan tersebut disesuaikan dengan konteks dalam pemakaian istilah governance. Governance berasal dari kata "govern" yang berarti mengambil peran yang lebih besar, yang terdiri dari semua proses, aturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat. Secara luas, governance termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun non-pemerintah (Dwiyanto, 2015:251).

Dalam konsep governance, pemerintah atau government merupakan salah satu aktor dan bukan menjadi aktor tunggal dan tidak selalu menjadi aktor yang paling menentukan.

Menurut Chema dalam Keban (2008:38), governance merupakan suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, politik dikelola melalui interaksi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Oleh karena itu, institusi dari governance meliputi tiga domain yaitu state (negara atau pemerintah), private sector (sektor swasta atau dunia usaha) dan society (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing (Sedarmayanti, 2003:5). Sementara Ulum dan Ngindana (2017:6) menyebutkan bahwa governance mengindikasikan 'disesiminasi otoritas' dari single actor menjadi multi-aktor. Berdasarkan beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa dalam konsep governance, beberapa urusan-urusan publik yang sebelumnya dikelola oleh aktor tunggal yakni pemerintah menjadi dikelola bersama dengan aktor-aktor lain seperti sektor swasta dan masyarakat. dengan adanya governance menjadikan pemerintah tidak lagi dominan dan menciptakan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan urusan-urusan public.

Abidin dkk (2013:10) memetakan bahwa terdapat 3 aktor yang berpengaruh dalam proses governance. Tiga aktor tersebut yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. ketiga aktor tersebut saling berkolaborasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang memonopoli penyelenggaraan pemerintah. melainkan memerlukan aktor lain karena keterbatasan kemampuan pemerintah. Swasta dengan dukungan finansialnya harus mampu membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Swasta dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk mengurus kepentingan sendiri yakni hanya semata-mata mencari keuntungan pribadi.

Salah satu bentuk dalam konsep penyelenggaraan pemerintahan atau governance yakni disebut konsep collaborative governance atau penyelenggaraan pemerintahan yang

kolaboratif. Menurut pendapat Ansell dan Gash "Collaborative governance is therefore a type of governance in which public and private actor work collectively in distinctive way, using particular processes, to establish laws and rules for the provision of public goods" (Ansell dan Gash, 2007:545). Collaborative Governance dapat dikatakan sebagai salah satu dari tipe governance. Konsep ini menyatakan akan pentingnya suatu kondisi dimana aktor publik dan aktor privat (bisnis) bekerja sama dengan cara dan proses tertentu yang nantinya akan menghasilkan produk hukum, aturan, dan kebijakan yang tepat untuk publik atau masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aktor publik yaitu pemerintah dan aktor privat yaitu organisasi bisnis atau perusahaan bukanlah suatu yang terpisah dan bekerja secara sendiri-sendiri melainkan bekerja bersama demi kepentingan masyarakat.

Kolaborasi dipahami sebagai kerjasama antar aktor, antar organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara independent. Dalam bahasa Indonesia, istilah kerjasama dan kolaborasi masih digunakan secara bergantian dan belum ada upaya untuk menunjukkan perbedaan dan kedalaman makna dari istilah tersebut. Secara definisi, para ahli mendefinisikan collaborative governance dalam beberapa makna yang ide utamanya sama, yakni adanya kolaborasi antara sektor publik dan non publik atau privat dalam penyelenggaraan pemerintahan atau governance. Ansell dan Gash (2007:546) mendefinisikan collaborative governance sebagai berikut ini:

Collaborative governance adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung stakeholder non-state di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi consensus dan deliberative yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program atau aset.

Disamping pendapat tersebut, pendapat lain mengenai collaborative governance dikemukakan Agranoff dan McGuire dalam Chang (2009:76-77) yang menyatakan

sebagai berikut:

Secara khusus, collaborative governance telah menempatkan banyak penekanan pada kolaborasi horisontal sukarela dan hubungan horizontal anatara partisipan multi sektoral, karena tuntutan dari klien sering melampaui kapasitas dan peran organisasi publik tunggal, dan membutuhkan interaksi di antara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik. kolaborasi diperlukan untuk memungkinkan governance menjadi terstruktur sehingga efektif memenuhi meningkatnya permintaan yang timbul dari pengelolaan lintas pemerintah, organisasi, dan batas sektoral.

Berdasarkan pada pendefinisian oleh dua ahli tersebut, sebenarnya telah mendefinisikan collaborative governance dalam gagasan yang sama. Akan tetapi pada penjelasan Ansell dan Gash dapat dilihat bahwa aspek kolaborasi penyelenggaraan pemerintah lebih pada aspek perumusan dan implemtasi kebijakan publik atau program dari lembaga publik, dalam hal ini yakni pemerintah. Selain itu, dalam praktiknya kolaborasi penyelenggaraan pemerintah haruslah menjunjung tinggi nilai deliberative atau musyawarah dan konsensus antar tiap aktor atau stakeholder ya terlbat dalam kolaborasi tersebut.

Sementara itu, dalam pemikiran Agranoff dan McGuire, dikemukakan bahwa cooperative governance atau reformasi pemerintahan koperasi lebih bersifat umum, yaitu pemerintahan secara keseluruhan. Manajemen kolaboratif dalam hal ini lebih menitikberatkan pada aspek kesukarelaan dari praktik kolaboratif. Komitmen sukarela dari masing-masing aktor yang terlibat dalam kerjasama diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pencapaian tujuan kerjasama. Agar program atau kebijakan yang dilaksanakan lebih efektif karena melibatkan hubungan organisasi atau kelembagaan.

2. Pengertian Kolaborasi

Secara etimologi, collaborative berasal dari kata co dan labor yang mengandung makna sebagai penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati bersama. kolaborasi adalah adanya pola dan

bentuk hubungan yang dilakukan antarindividu ataupun organisasi yang berkeinginan untuk saling berbagi, saling berpartisipasi secara penuh, dan saling menyetujui atau bersepakat untuk melakukan tindakan bersama dengan cara berbagi informasi, berbagi sumber daya, berbagi manfaat, dan berbagi tanggung jawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk menggapai sebuah cita-cita untuk mencapai tujuan bersama ataupun untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh mereka yang berkolaborasi. (O'Leary, 2010).

3. Public Private Partnership (PPP)

Public Private Partnership adalah perjanjian atau kontrak antara pemerintah dengan sektor swasta yang antara lain; a) sektor swasta mengambilalih fungsi pemerintah selama periode waktu yang ditentukan, b) sektor swasta menerima kompensasi dari pelaksanaan fungsi tersebut baik langsung maupun tidak langsung, c) sektor swasta dibebani timbulnya risiko dari pelaksanaan fungsi tersebut, d) adapun fasilitas publik, tanah atau sumber-sumber daya yang lain dapat dialihkan sektor swasta. atau dapat digunakan oleh sektor swasta.

Dari definisi tersebut *Publik Private Partnership* merupakan suatu bentuk perjanjian atau kontrak antara sektor publik dan sektor privat yang terdiri atas beberapa ketentuan, antara lain: sektor privat menjalankan fungsi pemerintah untuk periode atau masa tertentu; sektor privat menerima kompensasi atas penyelenggaraan fungsi, baik secara langsung maupun tidak langsung; sektor privat bertanggung jawab atas resiko yang timbul dari penyelenggaraan fungsi tersebut. Jadi, dalam *Publik Private Partnership* terdapat pengurangan aktivitas atau kepemilikan pemerintah dalam suatu pelayanan atau industri tertentu dikarenakan sektor privat (swasta) ikut berpartisipasi dalam penyediaan layanan.

4. Konsep Pembinaan

Pembinaan adalah proses pembelajaran di mana Anda melepaskan hal-hal yang sudah Anda miliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum Anda miliki. Tujuannya adalah untuk membantu orang yang menjalaninya untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang ada, serta

memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru untuk mencapai tujuan hidup dan bekerja lebih efisien.

Pembinaan adalah proses melepaskan hal-hal yang dimiliki, membongkar pengetahuan dan praktik yang tidak lagi membantu dan menghalangi kehidupan dan pekerjaan, dan belajar, belajar pengetahuan dan praktik baru yang dapat meningkatkan kehidupan dan pekerjaan. Tujuannya agar peserta pelatihan mampu mencapai tujuan hidup atau pekerjaannya dengan lebih efektif dan efisien dari sebelumnya.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa unsur pokok pembinaan adalah memperoleh sikap atau keterampilan. Arti lainnya dari pelatihan adalah tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini berarti kemajuan, perbaikan, pertumbuhan, perkembangan berbagai kemungkinan, perkembangan atau perbaikan sesuatu. Dalam pengertian ini, ada dua unsur, yaitu pertama, pelatihan itu sendiri bisa berupa tindakan, proses, atau pernyataan niat, dan kedua, pembinaan bisa merujuk pada "perbaikan" sesuatu.

Secara konseptual, pembinaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.

Dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek. Pembinaan menurut Masdar Helmi (2008) adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala

sesuatu secara teratur dan terarah. Ketidaktercapaian yang diharapkan akan sangat mempengaruhi kondisi seseorang tersebut baik secara psikis maupun mental. Di sini peran pembinaan ini sangat diperlukan guna me-refresh kondisi psikis dan mental seseorang agar kembali agar tidak mengalami depresi, dan hal ini sangat membantu agar apa yang direncanakan tadi dapat tercapai dengan baik.

Dalam hal suatu pembinaan menunjukkan adanya suatu kemajuan peningkatan, atas berbagai kemungkinan peningkatan, unsur dari pengertian pembinaan ini merupakan suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan menunjukkan kepada "perbaikan" atas sesuatu istilah pembinaan hanya diperankan kepada unsur manusia, oleh karena itu pembinaan haruslah mampu menekan dan dalam hal-hal persoalan manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat Menurut M Furqon (2002: 1-2) "proses pembinaan memerlukan waktu yang lama, yakni mulai dari masa kanak-kanak atau usia dini hingga anak mencapai tingkat efisiensi kompetisi yang tertinggi". Pembinaan dimulai dari program dari program umum mengenai latihan dasar mengarah pada pengembangan efisiensi olahraga secara komprehensif dan kemudian berlatih yang dispesialisasikan pada cabang olahraga tertentu.

Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-intruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Usaha-usaha pembinaan merupakan persoalan yang normatif yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Menurut Darmadi (2013) mendefinisikan metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti suatu kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Penelitian jenis deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian tapi berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya Menurut Bodgan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong (2000) mendeskripsikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data dan perilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik. Metode penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.

Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian.

Menurut Nazir (1988), Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Sedangkan menurut Sugiyono (2005) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Menurut Whitney (1960), metode

deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data-data penelitian adalah studi kepustakaan dan studi lapangan.

- a) Studi Kepustakaan, yaitu proses pengumpulan data mengenai teori-teori yang digunakan sebagai acuan dasar dalam menganalisa apa saja permasalahan dengan menggunakan buku-buku dari beberapa ahli.
- b) Studi Lapangan, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi yaitu meliputi proses wawancara, dokumentasi, dan observasi

3. Teknik Analisis Data

Miles & Huberman membatasi presentasi pada informasi terstruktur yang memungkinkan Anda menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Mereka percaya bahwa kinerja yang lebih baik merupakan inti dari analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai matriks, grafik, jaringan dan diagram. Semuanya dirancang untuk menyatukan informasi terorganisir dalam format yang konsisten dan mudah diakses. Hal ini memungkinkan penganalisa untuk melihat apa yang terjadi dan memutuskan apakah akan menarik kesimpulan yang benar atau melanjutkan analisis berdasarkan saran yang berguna dalam presentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu. H. analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik pengolahan data berupa validasi data dan tabulasi. Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode grounded theory yaitu. H. panduan mendalam melalui analisis informasi yang sistematis dan intensif dengan tujuan menemukan teori, hipotesis dan saran langsung dari materi. Hal ini juga dilakukan dengan membaca deskripsi data, grafik data atau bagan yang kemudian dideskripsikan. Proses analisis data dimulai dengan mengumpulkan data yang diperoleh, kemudian membuang data atau memilih dan memilah data tertentu, kemudian mendeskripsikannya berdasarkan masalah yang dihadapi, dan selanjutnya mencari wawasan untuk mengkonfirmasi data

penelitian. 40 Pendekatan grounded theory (1967) adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan beberapa metode sistematis untuk mengembangkan teori dari bawah ke atas. Pendekatan ini pertama kali dikembangkan oleh dua sosiolog; Barney Glaser dan Anselm Strauss. Untuk itu, keduanya menulis empat (empat) buku, yaitu: *The Discovery of Grounded Theory* (1967), *Theoretical Sensitivity* (1978), *Qualitative Analysis for Social Scientist* (1987) dan *Fundamentals of Qualitative Research: "Prosedur dan Teknik Grounded Theory (1990)"*. Menurut kedua peneliti ini, pendekatan grounded theory merupakan metode ilmiah karena metode kerjanya dirancang secara cermat untuk memenuhi kriteria metode ilmiah. Kriteria yang dimaksud meliputi adanya makna, kesesuaian antara teori dan observasi, generalisasi, testabilitas, akurasi dan presisi, dan dapat diverifikasi.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Model kolaborasi pihak pemerintah dan pihak swasta dalam pembinaan atlet bulutangkis di jawa timur

Adapun kolaborasi atau Kerjasama pemerintah dengan pihak swasta dalam pembinaan atlet bulutangkis di jawa timur. Yaitu memberikan fasilitas terhadap pihak swasta dan pendanaan event atau lomba serta pendanaan pembinaan untuk meningkatkan prestasi atlet bulutangkis di jawa timur. Dan sesuai dengan undang undang nomer 11 tentang keolahragaan tentang Keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga secara berkelanjutan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam keolahragaan, termasuk perubahan strategis di lingkungan internasional. Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Jawa Timur.

a) Pemerintah memberikan fasilitas terhadap pihak swasta dalam pembinaan atlet bulutangkis.

Tugas fasilitator adalah memberikan fasilitas terhadap atlet di jawa timur. Misalnya dengan memberikan fasilitas pelatihan terhadap atlet bulutangkis dan juga memadai segala kebutuhan atlet bulutangkis di jawa timur.

b) Bekerjasama dengan Koni dan Unesa

Dinas Pemuda dan Olahraga berkoordinasi dengan Koni dan Unesa di Provinsi Jawa Timur dengan tujuan membina dan membina olahragawan di Jawa Timur agar olahragawan menjadi profesional dan bersaing secara regional maupun antarprovinsi. Kemudian juga Program Pembinaan Atlet Bulu Tangkis di Jawa Timur yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga yang dilaksanakan oleh DISPORA Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pengetahuan. Menyediakan wadah atau wadah pengembangan atlet menjadi profesional.

Hambatan Hambatan Model Kolaborasi Pihak Pemerintah Dan Pihak Swasta Dalam Pembinaan Atlet Bulutangkis Di Jawa Timur

Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Provinsi Jawa Timur harus bisa menjadi inovator untuk atlet agar pembinaan di jawa timur tetap berjalan dengan baik meskipun terdapat kendala yang belum selesai terkait anggaran yang kurang baik. Dimana inovasi-inovasi sangat di butuhkan dalam pembinaan atlet bulutangkis agar bisa meningkatkan prestasi atlet dan merencanakan program yang baik untuk pembinaan. Dan bisa menyediakan atau megfasilitasi kebutuhan untuk atlet bulutangkis.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Pemerintah memberikan fasilitas terhadap atlet di jawa timur. Misalnya dengan memberikan fasilitas pelatihan terhadap atlet bulutangkis dan juga memadai segala kebutuhan atlet bulutangkis di Jawa Timur. Penulis menyimpulkan bahwa dispora sangat penting dalam pembinaan dan program di luar pembinaan karena dengan adanya program pelatihan maka jawa timur sudah mempunyai pelatih yang mempunyai sertifikat dan sudah di akui oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan hal tersebut model kolaborasi pemerintah sebagai Kerjasama yang baik dalam perkembangan atlet adalah mempercepat proses perkembangan untuk berprestasi menjadi juara. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah melakukan berbagai langkah atau proses pembinaan terhadap atlet bulutangkis di jawa timur. Dari pernyataan di atas penulis

menyimpulkan, bahwa dinas pemuda dan olahraga ini sudah sangat berjuang dalam hal suksesnya pembinaan meski dalam kejadian yang nyata perannya di Dispora ini belum kelihatan oleh atlet-atlet bulutangkis.

2. Rekomendasi

- a. Lebih meningkatkan pada aspek mental atlet yang di rasa sangat perlu untuk di tingkatkan, agar para atlet tidak mengalami demam panggung.
- b. Hal yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas sarana-prasarana cabang olahraga yang dirasa masih butuh pembaharuan. Hal ini sangat diperlukan guna menunjang kualitas pelatihan dan pembinaan atlet. Jika beberapa cabang olahraga membutuhkan peralatan penunjang latihan, maka harap segera ditindaklanjuti. Namun jika fasilitas pendukung sudah sangat memadai, mungkin hanya dibutuhkan perawatann agar kualitas tetap terjaga.
- c. Dispora diharapkan bisa menaikkan pamor cabang olahraga yang dianggap masih belum digemari oleh masyarakat di provinsi jawatimur. Hal ini bertujuan menarik minat potensi-potensi baru di cabang olahraga tersebut dan meningkatkan peluang dalam meraih hasil maksimal.

REFERENSI

- Afiyanti, Y. (2008). Validitas Dan Reliabilitas Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(2), 137-141.
- Aksan, H. (2013). Mahir Bulu Tangkis. Bandung: Nuansa Cendekia
- Ariani, T. (2017). Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization (TAI): Dampak Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni*, 6(2), 169-177.

Etikaesti, Lupong. *Peran Pbsi Terhadap Pembinaan Klub Bulutangkis Di Kota Salatiga Tahun 2018*. Diss. Universitas Negeri Semarang, 2020.

Fauzy, Y. N. R. (2021). *Pengembangan Wirausaha Di Kabupaten Majalengka (Studi: Peranan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Majalengka)* (Doctoral Dissertation, Fisip Unpas).

Hadi, H. N. (2014). *Rekrutmen Dan Pembinaan Pembimbing Ibadah Haji Di KBIH As-Shodiqiyah Dan KBIH NU Kota Semarang (Perspektif Kebijakan Sertifikasi Bagi Pembimbing Ibadah Haji)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).

Herlyansyah, B., Priyadi, B. P., Djumiarti, T., & Rostyaningsih, D. (2021). The Role Of The Bekasi City Manpower Office In Determining The City Minimum Wage (UMK). *Journal Of Public Policy And Management Review*, 10(3), 436-456.

Hertika, F. F. (2019). *Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Menjalankan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten PONOROGO* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).

I PT, N. A. Y. P. (2021). Peran Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Ii Benoa Terkait Manajemen Keselamatan Di Atas Kapal Dan Upaya Pencegahan Pencemaran. *Karya Tulis*

Moleong, L. J., & Edisi, P. R. R. B. (2004). *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.

Putra, Ghazali Indra. "Analisis Peran Pelatih Terhadap Prestasi Bulutangkis Di Kabupaten Bungo." *Jurnal Muara Olahraga* 1.1 (2018): 1-13.